

**PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

(STUDI PADA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HAMAM SUBAGYO

155030400111016



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2020



MOTTO

SMILE, YOU DESERVE TO BE HAPPY. – UNKNOWN



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universita Brawijaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Maret 2021

Pukul :

Skripsi atas nama : Hamam Subagyo

Judul : Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Astri Warih Anjarwati, SE., MSA, Ak
NIP. 2013048703162001

Anggota

Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA, Ak
NIP. 198708312014042001

Anggota

Priandhita Sukowidvanti Asmoro, SE., MSA, Ak
NIP. 198611172015042002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Disusun Oleh : Hamam Subagyo
NIM : 155030400111016
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis
Program Studi : Perpajakan

Malang, 22 Desember 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak

NIP. 2013048703162001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Pembangunan Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 22 Desember 2020



Hamam Subagyo

RINGKASAN

Hamam Subagyo, 2020, **Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN**, Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak.. 95 hal + xv

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi PPN dianggap penting bagi pemasukan negara karena merupakan penyumbang jenis pajak terbesar kedua. PPN bersinggungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan variabel makro ekonomi berupa inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN (2) mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN (3) mengetahui pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN. Data inflasi, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan PPN yang digunakan adalah jenis data sekunder dari tahun 2014-2018. Jenis penelitian menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap PPN Besarnya pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R) adalah sebesar 0.530 Artinya, 53 % penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, sisanya sebesar 47 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan PPN

SUMMARY

Hamam Subagyo, 2020, **Influence of Inflation and Economic Growth on Value Added Tax Revenue**, Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak.. 95 hal + xv

Value Added Tax (VAT) based on consumption goods, services in the customs area. VAT contribution substantial considered for country revenue because it is type of the tax that has second biggest contribution. VAT directly related people behavior to consume goods and services has connectivity to the macro-economic condition, therefore in this research is using macro-economic variable consist of inflation and economic growth.

The aim of this research is to (1) determine the effect of inflation on the VAT revenues (2) to determine the effect of economic growth on the VAT revenues (3) to determine the effect of inflation and economic growth on the VAT revenues. Data type used consist of inflation, economic growth, and VAT revenues are secondary data began the period 2014-2018. The type of research used is the explanatory research with the quantitative approach. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis.

The results of the research shows that Inflation Rate and Economic Growth Rate affect partially and simultaneously to Value Added Tax (VAT). The magnitude of influence of Inflation Rate and Economic Growth Rate shown with determination coefficient (R^2) is 0.530. That is, 53 % of Value Added Tax (VAT) is affected by Inflation Rate and Economic Growth Rate, while the rest 47 % influenced by other variable is not explained in the research.

Keywords: Inflation, Economic Growth, VAT Revenue

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini...

Untuk semua orang tua saya dan juga adik serta teman-teman saya

Terimakasih atas bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	11
I.3 Tujuan Penelitian	11
I.4 Kontribusi Penelitian.....	12
I.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1 Tinjauan Empiris	15
II.1.1 Penelitian Terdahulu	15
II.2 Tinjauan Teoritis.....	20
II.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
II.2.1.1 Pengertian PPN.....	20
II.2.1.2 Subjek PPN.....	20
II.2.1.3 Objek PPN	21
II.2.1.4 Saat Terutang PPN	22
II.2.1.5 Tempat Terutangnya PPN	23
II.2.1.6 Tarif Pengenaan PPN	24
II.2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	24
II.2.2 Inflasi.....	25

II.2.2.1	Pengertian Inflasi.....	25
II.2.2.2	Metode Perhitungan Laju Inflasi.....	26
II.2.2.3	Jenis-Jenis Inflasi.....	29
II.2.2.4	Biaya Inflasi.....	31
II.2.2.5	Dampak Inflasi.....	33
II.2.2.6	Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi.....	35
II.2.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	35
II.2.3.1	Pengertian pertumbuhan ekonomi.....	35
II.2.3.2	Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	37
II.2.3.3	Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.....	41
II.2.3.4	Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.....	44
II.2.4	Hubungan Antar Variabel.....	45
II.2.4.1	Hubungan Inflasi Dengan Penerimaan PPN.....	45
II.2.4.2	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan PPN.....	46
II.3	Model Konseptual dan Hipotesis.....	47
II.3.1	Model Konseptual.....	47
II.3.2	Hipotesis.....	48
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
III.1	Jenis Penelitian.....	49
III.2	Lokasi Penelitian.....	50
III.3	Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran.....	51
III.3.1	Variabel.....	51
III.3.2	Definisi Operasional Variabel.....	52
III.3.3	Skala Pengukuran.....	53
III.4	Populasi dan Sampel.....	54
III.5	Metode Pengumpulan data.....	55
III.6	Teknik Analisis Data.....	56
III.6.1	Uji Asumsi Klasik.....	56
III.6.1.1	Uji Normalitas.....	56
III.6.1.2	Uji Multikolonieritas.....	56
III.6.1.3	Uji Autokorelasi.....	57
III.6.1.4	Uji Heteroskedastisitas.....	57
III.6.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	58

III.6.3 Pengujian Hipotesis	59
III.6.3.1 Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)	59
III.6.3.2 Uji Signifikan Parsial (uji statistik t).....	60
III.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	61
BAB IV.....	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
IV.1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	62
IV.1.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.....	64
IV.1.3 Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	64
IV.2 Analisis dan Pembahasan	65
IV.2.1 Statistik Deskriptif.....	65
IV.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	66
IV.2.2.1 Uji Normalitas.....	66
IV.2.2.2 Uji Multikolonieritas.....	68
IV.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	70
IV.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	72
IV.2.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
IV.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	75
IV.2.4.1 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	75
IV.2.4.2 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)	76
IV.2.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	77
IV.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	78
IV.2.5.1 Pengaruh Inflasi (X ₁) terhadap Penerimaan PPN (Y).....	79
IV.2.5.2 Pengaruh PDRB (X ₂) terhadap Penerimaan PPN (Y).....	80
IV.2.5.3 Pengaruh Inflasi (X ₁), PDRB (X ₂) Secara Simultan terhadap Penerimaan PPN (Y).....	81
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
V.1 Kesimpulan.....	83
V.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan PPN di Indonesia Tahun 2014-2018. 3

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 18

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran..... 53

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif 65

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas 67

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas 69

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi 72

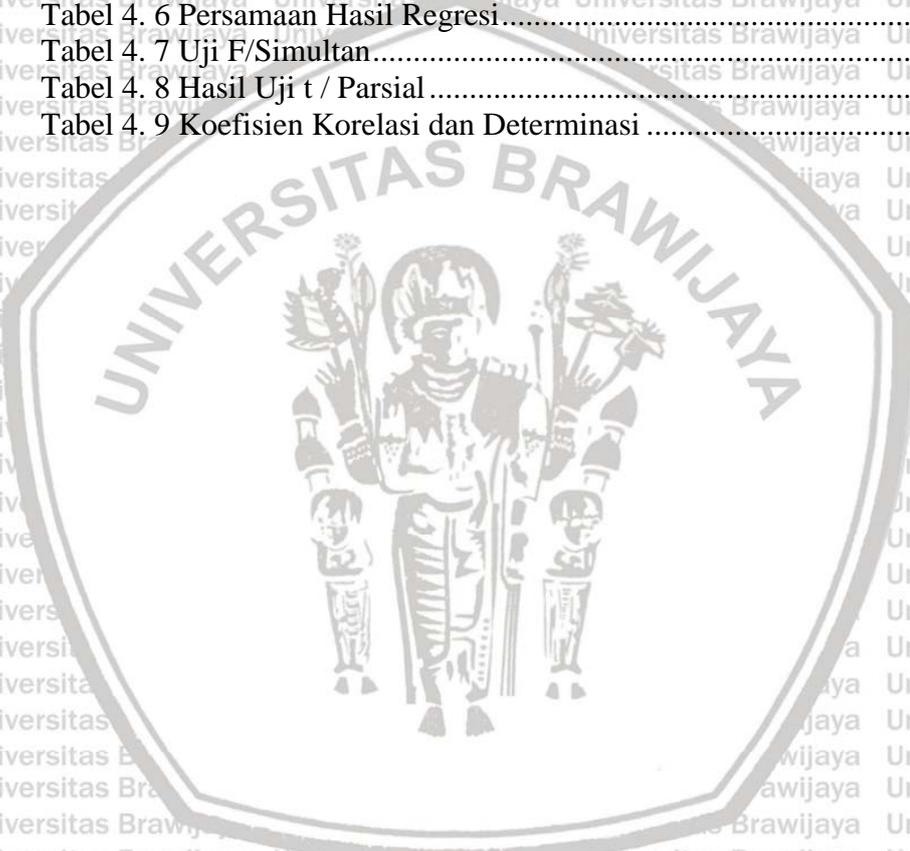
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas 73

Tabel 4. 6 Persamaan Hasil Regresi..... 74

Tabel 4. 7 Uji F/Simultan..... 75

Tabel 4. 8 Hasil Uji t / Parsial 76

Tabel 4. 9 Koefisien Korelasi dan Determinasi 78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018.....	2
Gambar 1. 2 Inflasi Kota Malang 2014-2018	7
Gambar 1. 3 PDRB Kota Malang	10
Gambar 2. 1 Model konseptual.....	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kanwil DJP Jatim III.....	64
Gambar 4. 2 P-P Plot.....	68





BAB I

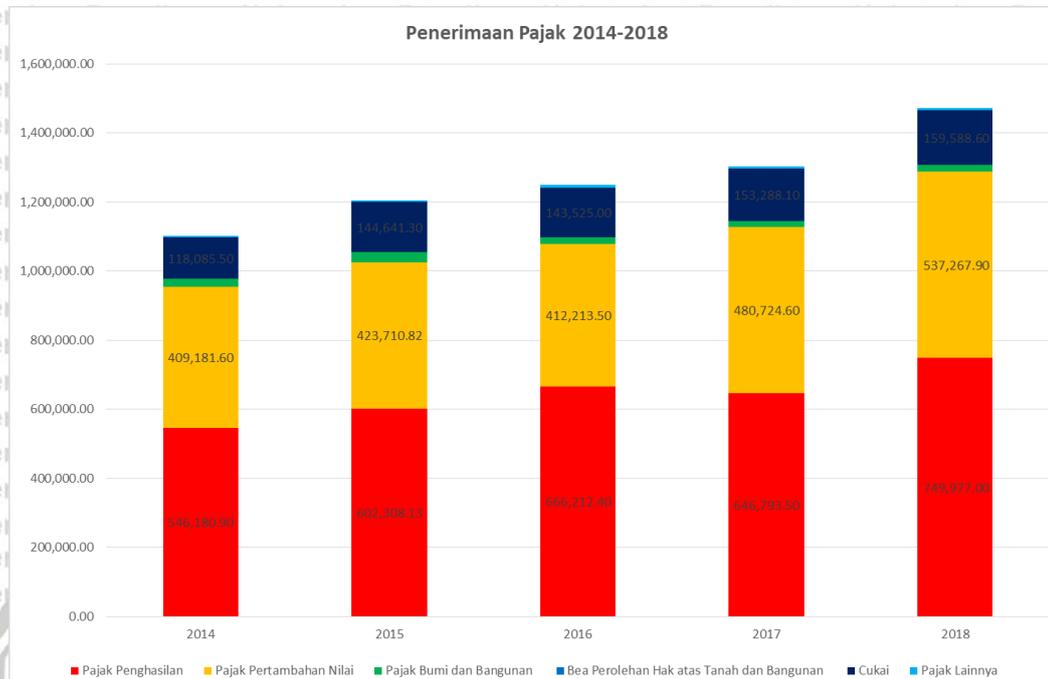
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Waluyo, 2005). Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Trisnayanti dan Jati, 2015). Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh) yang terbagi menjadi migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak dari perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak atas pungutan ekspor. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, pajaklah yang menyumbang penerimaan negara terbesar untuk APBN. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dan dijadikan sebagai sasaran yang strategis untuk menunjang kegiatan fiskal pemerintah.

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018



Sumber : www.bps.go.id, olahan peneliti.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPN terus meningkat dan signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Penurunan jumlah penerimaan terjadi hanya pada tahun 2016. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu komoditi dan dipungut pada setiap tahapan produksi, PPN hanya mempunyai satu macam tarif untuk berbagai kelompok komoditi dengan demikian maka pembagian beban pajak akan lebih merata karena setiap produk yang dijual dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama (Utari, 2008).

Dibalik penerimaan PPN yang selalu meningkat dari tahun ketahun.

Terdapat fenomena kurang maksimalnya realisasi penerimaan PPN di Indonesia.

Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak pada table 1.1

selama periode 2014-2018 realisasi penerimaan PPN tidak pernah melampaui target

yang ditetapkan kecuali pada tahun 2017. Berikut ini adalah table yang menjelaskan

mengenai pencapaian realisasi penerimaan PPN:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan PPN di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	Target (miliar)	Realisasi (miliar)	Capaian (%)
2014	475.589,86	408.829,94	85,96%
2015	576.469,17	423.710,32	73,50%
2016	474.235,34	412.213,45	86,92%
2017	475.483,49	480.721,27	101,34%
2018	541.801,13	537.267,90	99,16%

Sumber : Laporan Tahunan DJP diolah penulis (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan PPN dalam lima tahun

terakhir berfluktuasi, pencapaian penerimaan PPN tahun 2017 adalah pencapaian

terbaik karena dapat melebihi target yaitu sebesar 101,34 persen. Pada tahun 2018

pencapaian realisasi penerimaan PPN hampir mencapai target sebesar 99,16 persen.

Pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 85,96 persen.

Tahun 2015 realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya dengan pencapaian sebesar 73,50 persen dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan PPN mengalami kenaikan sebesar 86,92

persen dari target PPN yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut

menunjukkan bahwa penerimaan PPN belum maksimal. Presentase realisasi

penerimaan secara nasional yang tidak sesuai target tersebut juga terjadi di lingkup

yang lebih kecil yaitu Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III, di mana dalam implementasinya Kanwil DJP Jatim III juga gagal dalam pencapaiannya dalam periode tahun 2014-2018. Hanya pada tahun 2017 Kanwil DJP Jatim III berhasil melebihi target penerimaan dengan pencapaian 100,33 persen atau Rp 25,80 Triliun dari target Rp 25,72 Triliun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN di Kanwil DJP Jatim III belum maksimal. Direktorat Jendral Pajak maupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar penerimaan PPN setiap tahun selalu meningkat, akan tetapi hal tersebut belum terwujud, sehingga perlu dilakukan suatu kajian untuk mengetahui penyebab hal tersebut.

Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba meneliti mengenai variabel apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Penelitian Damayanti (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Penelitian Sri Ayu (2017) dan penelitian Damayanti (2016) menunjukkan hasil bahwa Inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian Margareth (2018) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan. Penelitian Laily (2018) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh pada penerimaan PPN, tetapi beberapa penelitian lain menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut peneliti memilih untuk melakukan

penelitian kembali mengenai variabel makro ekonomi yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi digunakan karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam makro ekonomi.

Menurut Nota Keuangan dan APBN TA (2017) upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PPN adalah mendorong ekonomi makro dalam konsumsi dan daya beli masyarakat, selain itu juga hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Meningkatnya pengeluaran konsumsi secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan PPN. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam penerimaan PPN terdapat indikator ekonomi makro yang harus dijaga yaitu stabilitas indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

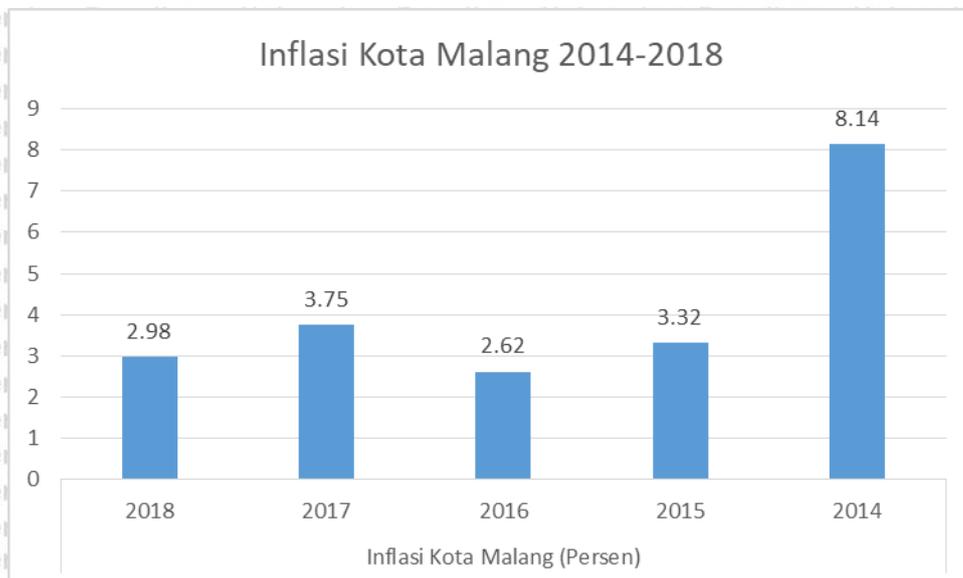
Penerimaan pajak yang terjadi sejak reformasi perpajakan tentu akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi. Sinaga (2010:3), "Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi secara makro merupakan dasar bagi pengenaan pajak. Jika dasar pengenaan pajak naik, maka penerimaan pajak juga akan naik, demikian juga sebaliknya." Disimpulkan bahwa selain faktor kebijakan yang ada pada internal Direktorat Jenderal Pajak seperti penerapan tarif pajak, juga terdapat faktor eksternal yaitu ekonomi makro yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak.

Ada beberapa variable yang terdapat dalam ekonomi makro. Menurut Sukirno (2011:9), "Masalah pertumbuhan makro ekonomi utama yang akan selalu dihadapi sesuatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, kenaikan harga-harga (inflasi), dan masalah neraca

perdagangan dan neraca pembayaran”. Variabel-variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Di sisi lain, variabel-variabel ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat fluktuatif atau mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Inflasi perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah karena besarnya dampak yang ditimbulkan. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Hal tersebut dikuatkan dengan penelitian Ilyas dan Hartono (2007) yang menyimpulkan bahwa beberapa variable ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Inflasi mempengaruhi variabel makro ekonomi seperti ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan serta inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Nersiwad,2002). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Vito Tanzi (1977), Sinaga (2010) dan Kusmono (2011) dimana tingkat inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan menurut David G and Bernard J (1977) mengatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi baik pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Tingkat inflasi pun dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN.

Gambar 1. 2 Inflasi Kota Malang 2014-2018



Sumber : www.malangkota.bps.go.id, olahan peneliti.

Dapat dilihat berdasarkan gambar 1.2 diatas bahwa inflasi di Kota Malang mengalami fluktuasi. Namun fluktuasi tersebut masih dianggap wajar karena masih dibawah 10%. Hal tersebut berarti tingkat inflasi di Kota Malang masuk dalam kategori inflasi ringan dan masi dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Variabel selanjutnya yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu komponen ekonomi makro yang harus diperhatikan serta dicapai dalam proses pembangunan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.

Menurut Myles (2000) pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak.

Peacock dan Wiseman (1961), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat dan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak. Menurut Heady (2000) seperti yang dikutip

Gunawan (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penerimaan pajak. Izedonmi dan Okunbor (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan PPN.

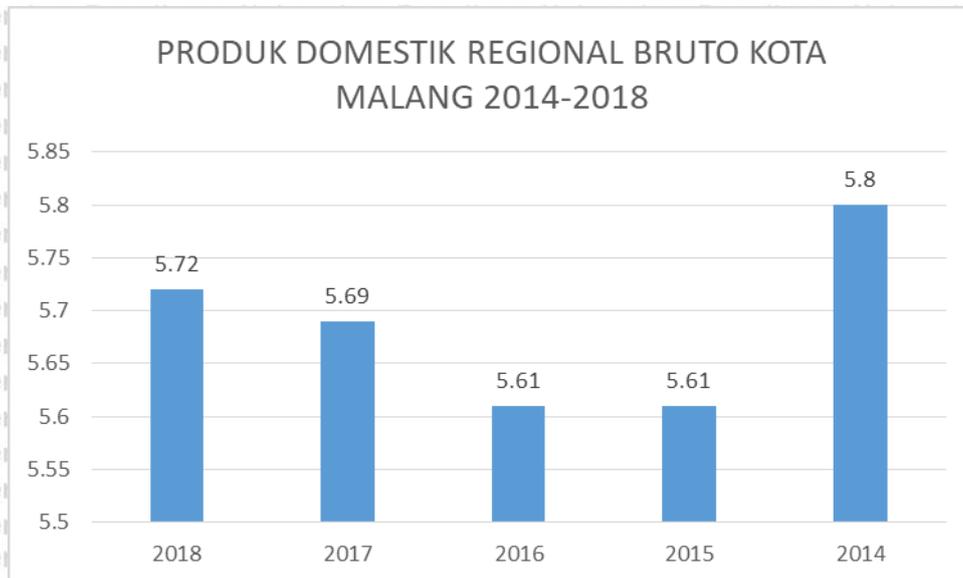
Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi disuatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB menunjukkan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Suatu negara dapat dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan (Velaj dan Prendi, 2014). PDB digunakan pada tingkat nasional, sementara untuk tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten/kota bahkan kecamatan, hal itu dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB yang berasal dari harga konstan sehingga akan menghasilkan angka pertumbuhan riil karena adanya penambahan produksi.

Kinerja keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah diukur dari besarnya PDRB. Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang baik dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2014-2018 cenderung meningkat (simreg.bappenas.go.id). Kinerja keberhasilan yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Timur tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang terjadi di setiap kota atau kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Provinsi Jawa Timur sendiri membagi kondisi pertumbuhan ekonomi menjadi empat jenis kuadran.

Kuadran IV merupakan kabupaten atau kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Kabupaten atau kota yang termasuk kedalam kuadran IV antara lain Kabupaten Jember, Banyuwangi, Malang Mojokerto, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang dan Kota Surabaya.

Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu atau biasa disebut Kawasan Malang Raya merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung baik. Dikarenakan Kawasan Malang Raya terdapat banyak bidang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan PDRB. Salah satunya bidang pertanian, perkebunan, industri, maupun tempat hiburan atau rekreasi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pada setiap sektor dalam rangka meningkatkan PDRB tentunya berhubungan dengan kegiatan konsumsi yang juga tidak terlepas dari pengenaan PPN. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat konsumsi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula PPN yang akan diterima.

Gambar 1.3 PDRB Kota Malang



Sumber : www.malangkota.bps.go.id, olahan peneliti.

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sempat mengalami penurunan pada tahun 2015. Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kota Malang menunjukkan tren positif sehingga perlahan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018.

Banyak faktor penyebab naik turunnya penerimaan PPN antara lain dipengaruhi oleh ekonomi makro dan kegiatan ekonomi yang terjadi. Penelitian ini dirasa penting karena penerimaan PPN erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak terlepas dari variable ekonomi makro.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana kedua variabel diatas mempengaruhi penerimaan PPN. Agar kedepannya dapat teridentifikasi sebab tidak tercapainya atau turunnya realisasi penerimaan PPN dan untuk meminimalisir hal-hal yang dapat mempengaruhi penurunan tersebut. Supaya kedepannya penerimaan PPN dapat dimaksimalkan.

Objek penelitian kali ini dilakukan di Kanwil DJP Jawa Timur III yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Penulis melakukan penelitian ini karena wilayah ini merupakan wilayah yang mulai berkembang cukup pesat dari segi perkebunan, pertanian, pariwisata, pendidikan, serta industri yang menyebabkan cukup banyak penduduk, baik pendatang maupun penduduk asli yang melakukan kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan penerimaan PPN. Sehingga sedikit banyak dapat merepresentasikan untuk dijadikan wilayah penelitian ini. Berdasarkan ulasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam skripsi dengan judul : ***Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.***

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Malang Raya ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Malang Raya ?
3. Apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Malang raya?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

I.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menjelaskan dan menggambarkan teori daya beli penerimaan PPN dimana semakin banyak barang yang di beli, maka semakin besar pajak yang dibebankan serta teori pertumbuhan Joseph Schumpeter dan teori Keynes mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil tinjauan dan saran bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah terhadap faktor-faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN dan menentukan kebijakan-kebijakan guna memaksimalkan penerimaan PPN sehingga penerimaan PPN dapat meningkat.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rencana perbaikan kebijakan tentang pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pajak Pertambahan Nilai atau kebijakan sejenis dimasa mendatang agar penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan.

I.5 Sistematika Pembahasan

Sebagai sarana untuk mempermudah pengungkapan penelitian agar mudah dipahami maka penelitian disusun dengan alur pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi latar belakang permasalahan yang dijadikan pemikiran awal mengapa penelitian ini diungkap. Membahas fenomena yang sedang terjadi terkait penelitian. Terdapat rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang melandasi topik penelitian, mengangkat dasar teori, pendapat serta penelitian terdahulu. Selain itu juga terdapat model penelitian yang menginformasikan keterkaitan antar variabel dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, alasan mengapa menggunakan jenis penelitian tersebut. Menerangkan dimana lokasi penelitian diadakan serta alasan menggunakan lokasi tersebut.

Terdapat definisi variabel yang digunakan, serta menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Mengungkapkan bagaimana cara pengambilan sampel dan teknik serta metode pengumpulan data. Berisi instrumen pengambilan data penelitian. Menerangkan pula teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini ditulis penyajian data tentang variabel lebih jelasnya, permasalahan, hasil penelitian beserta uraiannya. Berisi cara dan metode analisis data untuk diterapkan supaya diketahui hasil penelitiannya tentunya dengan diikuti ulasan tentang analisis dan hasilnya.

BAB V PENUTUP

Bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi garis besar atas hasil pokok yang dianggap dapat merepresentasikan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran yang berisi pendapat tentang temuan penulis bagi kebijakan selanjutnya tentang topik penelitian ini agar lebih baik untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Empiris

II.1.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian berikut dianggap memiliki keterkaitan dengan pengaruh tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun beberapa penelitian yang terkait tersebut sebagai berikut:

a. Damayanti (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2016) berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, *Economic Growth*, dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-Negara Asia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, *economic growth*, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Penelitian ini menggunakan negara-negara yang masuk negara terbesar menurut GDP negara di Asia periode 2005-2014 dengan jumlah 50 sampel dengan memilih teknik sampel jenuh. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear. Hasil akhir menunjukkan jika tingkat inflasi, *economic growth*, dan tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,361 yang berarti 36,1% penerimaan pajak di negara-

negara Asia dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat banyak variabel diluar variabel pada penelitian ini yang dapat menjelaskan penerimaan pajak di negara-negara Asia.

b. Sri Ayu Mastiningsih (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Mastiningsih (2017) berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu Tahun 2011-2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data time series selama periode 2011-2015. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap PPN. Besarnya pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,527. Artinya, 52,7% penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi tingkat inflasi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia, sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

c. Margareth Juniarti Song Dala (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Margareth Juniarti Song Dala (2018) berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh variable Inflasi (X1) terhadap Penerimaan PPN (Y), Nilai Tukar Rupiah (X2) terhadap Penerimaan PPN (Y). Data inflasi dan nilai tukar rupiah yang digunakan jenis data sekunder dari tahun 2007-2017.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Berdasarkan variable independen berupa data inflasi dan nilai tukar rupiah sedangkan untuk variabel dependen menggunakan penerimaan PPN, maka teknik analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis t dan F, variable independen mempunyai pengaruh parsial dan simultan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 32,3% oleh variabel independennya.

d. Laily Dwi Yulianingtyas (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Laily Dwi Yulianingtyas (2018) berjudul “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* karena penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel bebas (nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP) dan terikat (penerimaan PPN) dengan pendekatan kuantitatif.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel nilai tukar rupiah (X1) dan jumlah PKP (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sedangkan variabel inflasi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Serta dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah (X1), inflasi (X2), dan jumlah PKP (X3) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul	Variabel	Analisis	Hasil Penelitian
Pengaruh Tingkat Inflasi, <i>Economic Growth</i> , dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-Negara Asia Damayanti (2016)	Bebas : 1. Tingkat inflasi 2. <i>Economic growth</i> 3. Tarif pajak Terikat : 1. Penerimaan pajak di negara-negara Asia	Regresi Linier Berganda	Variable bebas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN
Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu Tahun 2011-2015) Sri Ayu Mastiningsih (2017)	Bebas : 1. Tingkat inflasi 2. Tingkat suku bunga bank Indonesia Terikat : 1. Penerimaan PPN	Regresi Linier Berganda	Tingkat inflasi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap PPN.
Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Margareth	Bebas : 1. Tingkat inflasi 2. Nilai tukar rupiah Terikat :	Regresi Linier Berganda	Variable independen mempunyai pengaruh parsial dan simultan terhadap penerimaan PPN.

<p>Juniarti Song Dala (2018) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kema Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)</p> <p>Laily Dwi Yulianingtyas (2018)</p>	<p>1. Penerimaan PPN</p> <p>Bebas :</p> <p>1. Nilai tukar rupiah</p> <p>2. Inflasi</p> <p>3. Jumlah PKP Terikat :</p> <p>1. Penerimaan PPN</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Semua variable bebas mempunyai pengaruh parsial dan simultan kecuali variable inflasi terhadap penerimaan PPN.</p>
--	--	--------------------------------	---

Sumber: Olahan Peneliti (2020)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yang sama yaitu menggunakan jenis penelitian *explanatory*. Persamaan berikutnya adalah metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada jenis penelitian. Margareth (2018) menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Perbedaan selanjutnya adalah variabel yang digunakan terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak terdapat pada penelitian terdahulu.

II.2 Tinjauan Teoritis

II.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

II.2.1.1 Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Priantara, 2013:405). Sehingga dapat disimpulkan timbulnya kewajiban untuk membayar PPN bukan ditentukan kepada subjek yang melakukan konsumsi atas barang maupun jasa di daerah pabean, namun karena adanya objek pajak yang melekat sehingga kewajiban tersebut dapat dialihkan.

II.2.1.2 Subjek PPN

Subjek PPN pada dasarnya adalah WP pada Pajak Penghasilan (PPH), namun istilah PKP selalu dipakai untuk mereka yang bertanggung jawab terhadap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN (Priantara, 2013:406). Adapun WP yang dikategorikan sebagai subjek PPN adalah sebagai berikut:

a. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan

usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Priantara, 2013: 406).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengusaha adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan barang yang tujuannya adalah dikonsumsi bagi banyak orang. Dalam rangka kegiatan usaha tersebut terdapat kewajiban pajak yang melekat.

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Priantara, 2013:406). Adapun contoh PKP, yaitu Pengusaha industri tekstil, pedagang eceran (ritel) dan jasa konsultan.

c. Bukan PKP

Pengusaha yang tidak menghasilkan BKP dan/atau JKP meskipun tidak termasuk pengusaha kecil adalah bukan PKP (Priantara, 2013:407). Dengan demikian yang termasuk bukan PKP adalah pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, serta pengusaha yang menghasilkan dan/atau menyerahkan bukan BKP dan/atau bukan JKP.

II.2.1.3 Objek PPN

Transaksi atas penyerahan barang maupun jasa yang berhak dikenakan PPN adalah transaksi yang dilakukan selama masih di dalam Daerah Pabean. Adapun

Objek yang berhak dikenakan PPN menurut Mardiasmo (2013:303-304) adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor BKP;
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
- h. Kegiatan Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
- i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

II.2.1.4 Saat Terutang PPN

Pemungutan PPN pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau saat penyerahan JKP, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya, atau pada saat impor BKP (Priantara, 2012:438).

Adapun saat terutangnya PPN menurut Mardiasmo (2013:309-310) adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan BKP atau JKP;
- b. Impor BKP;
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
- e. Ekspor BKP Tidak Berwujud;
- f. Ekspor JKP;
- g. Pembayaran, pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.

II.2.1.5 Tempat Terutangnya PPN

Tempat terutangnya PPN adalah tempat kegiatan usaha dimana transaksi atas penyerahan BKP maupun JKP tersebut dilakukan. Adapun yang menjadi tempat terutangnya PPN menurut Mardiasmo (2013:310) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Penyerahan BKP/JKP meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, maupun tempat lain;
- b. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha;
- d. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, di tempat bangunan tersebut didirikan.

II.2.1.6 Tarif Pengenaan PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini merupakan tarif tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor JKP (Mardiasmo, 2013:306). Sehingga berapapun transaksi yang dilakukan, tetap dikenakan PPN hanya sebesar 10% (sepuluh persen).

II.2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Priantara, 2012:446). Dasar pengenaan yang digunakan tadi dikalikan dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Dari hasil pengalian DPP dengan tarif, maka diperolehlah pajak yang terutang dan harus dibayar.

II.2.2 Inflasi

II.2.2.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus.

Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus menerus, akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat.

Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. (Putong, 2013:417).

Menurut Rahadja (2004: 319), "Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus". Menurut Nanga (2005), "Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus".

Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut:

a. Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang: seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

b. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Contohnya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena BBM merupakan komoditas strategis maka kenaikan harga BBM akan merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain. Bahkan kenaikan BBM akan mengundang kaum buruh menuntut kenaikan upah harian untuk memelihara daya beli mereka.

c. Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi minimal dilakukan dalam rentang waktu bulanan. Sebab dalam waktu sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, berarti akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata $25\% (10\%:4)$, sedangkan inflasi bulanan sekitar $0,83\% (10\%:12)$.

II.2.2.2 Metode Perhitungan Laju Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka Indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat harga (barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok/utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang di indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang

yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK atau *Consumer Price Index* = CPI). Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 bulan dan 1 tahun. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB Deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB Nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riel) (Putong, 2013:418).

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weighted*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota propinsi-propinsi di Indonesia.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun x

$IHK_{(t-1)}$ = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Angka IHK diperoleh dari menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat, dengan memberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya dari masing-masing harga barang dan jasa.

b. Indeks harga produsen

Hampir serupa dengan indeks harga konsumen, namun bedanya terletak pada sisi ekonominya. Indeks harga produsen dinilai dari sisi produsen.

Menunjukkan harga barang yang dibeli oleh produsen.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHP_t - IHP_{(t-1)}}{IHP_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHP_t = Indeks Harga Produsen tahun x

$IHP_{(t-1)}$ = Indeks Harga Produsen tahun sebelumnya

c. GNP Deflator (Indeks Harga Implisit)

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHI_t - IHI_{(t-1)}}{IHI_{(t-1)}} \times 100\%$$

II.2.2.3 Jenis-Jenis Inflasi

Menurut (Putong, 2013:422-423) terdapat beberapa jenis-jenis inflasi diantaranya:

1. Inflasi Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu:

- a. Inflasi merayap/ rendah (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun.

Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya.

- c. Inflasi berat (*High Inflation*) yaitu inflasi yang besarnya antara 30%-100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
- d. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*) yaitu inflasi yang ditandai oleh

naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

2. Berdasarkan Sebabnya

- a. *Demand pull inflation*. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disatu pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai

dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

- b. *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi maka dua hal yang bias dilakukan oleh produsen, yaitu: pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

3. Berdasarkan asalnya

Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Kedua inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-

harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

II.2.2.4 Biaya Inflasi

Inflasi dalam perekonomian, tidak hanya dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Akan tetapi di sisi lain ketiadaan inflasi menandakan tidak adanya pergerakan positif dalam perekonomian karena relatif harga-harga tidak berubah dan ini jelas akan melemahkan sektor industri (seandainya pada semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional relatif tidak mengalami inflasi maka tentu saja ini adalah hal yang sangat didambakan).

Inflasi yang tidak diharapkan dan tidak diharapkan, menimbulkan biaya implisit. Adapun biaya tersebut adalah:

1. Biaya inflasi yang diharapkan muncul, karena:

- a. *Shoe Leather Cost* (biaya kulit sepatu) adalah istilah yang menyatakan bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan maka relatif penetapan suku bunga bank akan lebih besar dari tingkat inflasi (dalam hal diatas 7% p.a) hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk berkali-kali menarik uangnya di Bank atau ATM. Biaya yang muncul adalah biaya transport + biaya layanan ATM dan biaya terduga lainnya.

b. *Menu cost* (biaya menu) yaitu biaya yang muncul karena perusahaan harus sering merubah harga dan itu berarti harus mencetak dan mengedarkan katalog baru.

c. *Complaint and Oppurtunity loss cost* (biaya komplain dan hilangnya kesempatan). Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti katalog baru maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan menjual dengan harga lama. Bila tidak disengaja maka perusahaan akan mendapat komplain dari pelanggan karena harga tidak sesuai dengan katalog (khususnya untuk negara yang tingkat konsumen relatif sangat baik).

d. Biaya perubahan peraturan/undang-undang pajak. Dengan diketahui tingkat inflasi maka otoritas pajak akan merubah tarif dan sistem pungutan, dan ini tentu saja harus merubah peraturan dan undang-undangnya terlebih dahulu.

e. Biaya ketidaknyaman hidup. Sehubungan dengan poin 1-4 maka akan menyebabkan perencanaan keuangan dan laba menjadi tidak menentu. Sebab bila diketahui inflasi akan naik atau turun maka perencanaan keuangan akan mengalami revisi.

2. Biaya dari Inflasi yang tidak diharapkan

a. Redistribusi pendapatan antara debitur dan kreditor. Lazimnya perjanjian antara kreditor dan debitur ditentukan berdasarkan suku bunga nominal yang mempertimbangkan tingkat inflasi yang diharapkan. Bila tingkat

inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan maka debitur akan mengalami untung dan kreditur rugi. Sebaliknya bila inflasi lebih rendah dari yang diharapkan maka kreditur yang untung.

- b. Penurunan nilai uang pensiunan. Bila inflasi pada masa akan datang lebih besar dari yang diharapkan maka program dana pensiun relatif inefisien. Sebaliknya bila inflasi pada masa akan datang lebih kecil dari yang diharapkan maka penerima pensiun akan mendapatkan kenyamanan.

II.2.2.5 Dampak Inflasi

Pada umumnya inflasi memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan lain sebagainya. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi adalah sebagai berikut (Putong, 2013:422-423):

- a. Bila harga barang secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.

- b. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.
- c. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus menerus naik.
- d. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
- e. Bila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
- f. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.
- g. Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (*high end*) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
- h. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
- i. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.

- j. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

II.2.2.6 Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004, 354), kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu:

- a. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan penambahan produksi dan perkembangan teknologi.

II.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

II.2.3.1 Pengertian pertumbuhan ekonomi

Schumpeter dalam Putong (2013:411) menyatakan, "Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh penambahan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan".

Beberapa pakar ekonomi pembangunan berpendapat, "Pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan

pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi” (Putong, 2013:411).

Pertumbuhan ekonomi mengukur ataupun menerangkan prestasi suatu negara berdasarkan perkembangan pada perekonomian negara yang bersangkutan.

“Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal” (Sukirno, 2013:423).

Salah satu website internasional memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur dari pertumbuhan GDP menurut mata uang konstan, dimana GDP merupakan total nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan ditambah dengan pajak dikurangi subsidi (World Bank Data). “*Gross Domestic Product* (GDP) atau biasa disebut Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing” (Sukirno, 2011:35). GDP mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Gregori (2011:2) berpendapat, “GDP sering digunakan sebagai salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara dan dapat dibandingkan antara satu negara dengan yang lain dengan mengkonversikannya menjadi satu mata uang yang sama”.

II.2.3.2 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Banyak dari para ahli ekonomi dunia yang memberikan teori mengenai pertumbuhan ekonomi, dari banyak teori tersebut terdapat tiga teori yang paling dikenal dan sering digunakan sebagai acuan dalam menilai suatu pertumbuhan ekonomi, diantaranya dikemukakan oleh (Putong, 2013:414-417):

1. Teori Adam Smith

Adam Smith memaparkan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memandang kepada :

- a. Adanya hukum alam. Ia sangat percaya dengan prinsip bahwa hanya individu sendirilah yang tahu akan kebutuhannya, tidak orang lain apalagi pemerintah. Ia beranggapan bahwa adanya kekuatan yang tidak kentara (*invisible hand*) menyebabkan setiap perekonomian akan memperlakukan individu sesuai dengan harapannya. Jadi bila semua orang dibebaskan berusaha, maka akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat.
- b. Peningkatan daya produktivitas tenaga kerja berhubungan dengan : a) Meningkatkan keterampilan kerja. b) Penghematan waktu dalam memproduksi barang. c) Penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Kesemuanya itu berasal dari pembagian kerja.
- c. Proses penumpukan (akumulasi) modal. Menurutnya, proses akumulasi modal meningkat seiring dengan meningkatnya tabungan, dan dari tabunganlah asalnya investasi. Dengan demikian bila pendapatan naik

sementara konsumsi relatif tetap maka tabungan akan semakin tinggi dan berdampak pada penyediaan modal yang semakin banyak untuk investasi.

d. Tingkat keuntungan akan semakin menurun manakala tingkat persaingan semakin tinggi. Padahal persaingan berasal dari kemampuan investasi yang memajukan perekonomian. Pada masa ini tingkat suku bunga akan semakin menurun karena meningkatnya kemakmuran, kesejahteraan, dan jumlah penduduk bertambah. Akibat dari ini maka cadangan modal semakin besar sehingga investasi semakin murah dan akan berdampak pada semakin murahnya produksi.

e. Petani, pengusaha, dan produsen merupakan agen pertumbuhan dalam perekonomian. Jika pertanian meningkat maka usaha industri dan perniagaan semakin meningkat dan tentu saja akan memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian karena adanya rantai kebutuhan dan kepentingan.

f. Proses pertumbuhan bersifat menggumpal (mengakumulatif), setiap peningkatan di bidang pertanian maka akan ada peningkatan di bidang industri dan perniagaan dan seterusnya sampai terjadi kelangkaan sumber daya sehingga perekonomian mengalami kondisi stasioner.

2. Teori David Richardo

Richardo membangun teorinya dengan melihat adanya hubungan antara tuan tanah, kapitalis, dan kaum buruh. Menurutnya keseluruhan pendapatan nasional dibagikan kepada tiga kelompok itu berupa sewa, keuntungan, dan upah. Syarat perekonomian menurut Richardo memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Tanah (sumber daya alam) terbatas jumlahnya
- b. Tenaga kerja atau penduduk meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah batas minimal (tingkat upah alamiah)
- c. Akumulasi modal akan terjadi apabila tingkat keuntungan pemilik modal (pengusaha) meningkat di atas tingkat keuntungan minimal untuk melakukan investasi
- d. Kemajuan teknologi bersifat given (bagi beberapa kalangan ekonom, terjemahkan sebagai kemajuan teknologi selalu meningkat akan tetapi berhenti tanpa perkembangan yang berarti, terutama teknologi efisiensi pangan)
- e. Sektor perekonomian yang paling dominan

Adapun sumber perekonomian yang paling utama dalam perekonomian adalah pajak, tabungan, dan perdagangan bebas (teori keuntungan banding - *comparative advantages*).

Teorinya tentang sumber daya alam atau tanah terkenal dengan “Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang - *The Law Of Diminishing Return*” yang menunjukkan bahwa dasarnya karena jumlah tanah terbatas, maka pada saatnya hasil dari sumber daya alam itupun tetap semakin lama akan semakin menurun meskipun teknologi terbaru untuk sementara bisa mengatasinya. Oleh karenanya pada suatu saat akan terjadi “kondisi stasioner”: yaitu suatu pertemuan antara menurunnya jumlah produksi dan meningkatnya sewa dengan pertambahan penduduk yang terus saja naik (sebelum akhirnya akan

berhenti bertambah - tahap demografi yang ke empat). Adapun ciri-ciri dari kondisi stasioner adalah:

- a. Tingkat pertambahan/pertumbuhan output/pendapatan nasional relatif konstan
 - b. Jumlah penduduk relatif tetap
 - c. Pendapatan per kapita konstan karena a dan tetap
 - d. Tingkat upah pada tingkat alamiah
 - e. Akumulasi modal berhenti
 - f. Tingkat keuntungan minimal
 - g. Sewa tanah maksimal
3. Teori Harrod – Domar

Harrod menyatakan pertumbuhan yang terjamin (*Warranted of Growth*) yaitu pertumbuhan pendapatan haruslah melaju dengan kecepatan setara dengan kecenderungan menabung dikalikan dengan produktivitas modal, sedangkan menurut Domar syarat pertumbuhan mantap (*Steady of Growth*) pertumbuhan investasi haruslah melaju dengan kecepatan yang sama dengan kecenderungan menabung dan produktivitas modal. Jadi kedua ekonom ini pada dasarnya sama-sama mensyaratkan bahwa agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan mantap dan terjamin maka pertumbuhan investasi haruslah sama dengan pertumbuhan pendapatan nasional yang melaju dengan kecepatan yang sama dengan nilai MPS dikalikan dengan I/COR.

II.2.3.3 Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi

Sukirno (2011:429-432) mengungkapkan beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi :

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Peranan penanaman barang-barang pertanian untuk ekspor, dan industri pertambangan minyak di dalam menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia adalah suatu bukti yang nyata mengenai besarnya peranan kekayaan alam pada tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi. Peranan perkembangan industri pertambangan minyak di dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara timur tengah dan di Brunei adalah suatu bukti lain dari besarnya peranan pengembangan kekayaan alam di dalam permulaan proses pembangunan.

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun menghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Dorongan lain dari perkembangan penduduk adalah pertambahan luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang

dihasilkan sektor perusahaan akan bertambah pula. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan di mana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, pendapatan perkapita akan menurun.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai masa kini. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Efek yang utama adalah:

1. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi.
2. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat.
3. Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Juga di dalam sistem sosial di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah, atau dimana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis. Pembangunan ekonomi tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan.

Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang sedemikian itu antara lain adalah sikap berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras, dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.

Dapat disimpulkan banyak factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya:

- a. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara,
- b. Kualitas penduduk itu sendiri sehingga dapat mengolah segala potensi di negaranya,
- c. Barang modal dan kemajuan teknologi. Bagi negara yang tidak bisa menerima dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang telah berkembang negara tersebut akan tertinggal,

- d. Sikap masyarakat, masyarakat yang kolot dan tidak bisa menerima perkembangan zaman akan menghambat usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara.

II.2.3.4 Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara ditentukan dengan menghitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil. Dalam penghitungan pendapatan nasional di beberapa negara telah dilakukan penghitungan pendapatan nasional dan komponen-komponennya menurut harga tetap yaitu pada harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Sukirno (2011:50) memaparkan formula yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah:

$$g = \frac{PN \text{ riil}_1 - PN \text{ riil}_0}{PN \text{ riil}_0} \times 100$$

Dimana g adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan dinyatakan dalam persen. $PN \text{ riil}_1$ adalah pendapatan nasional dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung dan $PN \text{ riil}_0$ adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya.

Apabila suatu negara tidak melakukan penghitungan pendapatan nasional menurut harga tetap, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi penghitungan harus dilakukan dua tahap : (i) menghitung pendapatan nasional riil dengan mendeflasikan pendapatan nasional pada harga masa ini dan (ii)

menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Menghitung pendapatan nasional riil dengan mendeflasikan pendapatan nasional pada harga masa ini dilakukan dengan fomula berikut :

$$PN_{riil}_n = \frac{100}{HI_n} \times PN \text{ masa ini}$$

Dimana PN_{riil}_n adalah pendapatan nasional riil tahun n , HI_n adalah indeks harga atau pendeflasi pendapatan nasional (GNP deflator) pada tahun n , dan PN masa ini adalah pendapatan nasional pada harga masa ini, yaitu pada tahun n .

Setelah didapat data pendapatan nasional riil untuk berbagai tahun, tingkat pertumbuhan ekonomi telah dapat dihitung, yaitu menggunakan persamaan penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi (g) sebelumnya.

Jadi untuk menentukan persentase pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) suatu negara perlu diketahui terlebih dahulu pendapatan nasional riil tahun yang bersangkutan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

II.2.4 Hubungan Antar Variabel

II.2.4.1 Hubungan Inflasi Dengan Penerimaan PPN

Inflasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu kendala yang banyak dialami oleh berbagai negara dalam perekonomian adalah masalah inflasi, terlebih jika yang terjadi tingkat inflasi tinggi. Teori daya beli berhubungan dengan kemampuan

masyarakat dalam bertansaksi dengan pihak lain. Teori Keynes menjelaskan inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dan mengakibatkan permintaan yang lebih besar. Ketika terjadi inflasi, maka harga barang-barang akan cenderung meningkat (Natsir, 2014:253). Sedangkan, apabila inflasi menurun maka harga barang cenderung menurun. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi itu berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Ketika tingkat inflasi berada pada tingkat yang tidak terlalu tinggi berpengaruh terhadap penerimaan PPN melalui naiknya nilai nominal konsumsi dari pendapatan masyarakat dan konsumsi (Syahputra, 2006:9). Terlalu tingginya tingkat inflasi bisa berdampak negatif terhadap penerimaan pajak melalui perubahan kondisi ekonomi (Syahputra, 2006:10). Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2016) dan Laily (2018) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Margareth (2018) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diekspektasikan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

II.2.4.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan PPN

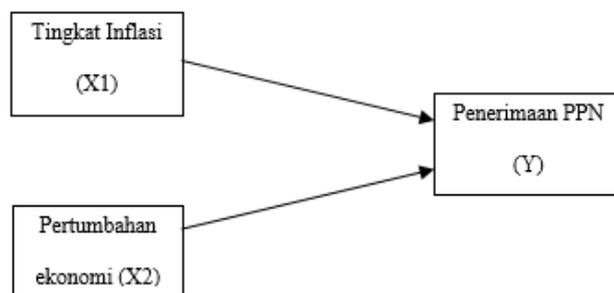
Sinaga (2010:3), “Perkembangan ekonomi memiliki korelasi yang positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi secara makro merupakan dasar bagi pengenaan pajak”. Jika dasar pengenaan pajak naik, maka penerimaan pajak juga akan naik, demikian juga sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznets, 2009). Pernyataan tersebut sejalan dengan teori pertumbuhan Joseph Schumpeter dan teori daya beli yaitu diperlukan peran dari para pengusaha yang bisa membuat inovasi di dalam perekonomian dengan melakukan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat maka akan meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli atas barang dan jasa yang tersedia dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya penerimaan PPN. Menurut Zeng (2013) pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Berdasarkan uraian tersebut maka diharapkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

II.3 Model Konseptual dan Hipotesis

II.3.1 Model Konseptual

Penelitian ini mencoba menjelaskan pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN. Dasar itulah yang menjadikan model konseptual dalam penelitian ini yang tampak pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 1 Model konseptual

II.3.2 Hipotesis

H1 : Tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

H2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

H3 : Tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Berdasarkan tujuan penelitian yang sedang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:14) menyebutkan bahwa “Penelitian kuantitatif adalah dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Latanussa dalam Sudjana (2004:40) mendefinisikan bahwa “Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode bilangan untuk mendeskripsikan observasi suatu objek atau variabel dimana bilangan menjadi bagian pengukuran”.

Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa jenis penelitian, di penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *explanatory research* seperti yang dikemukakan oleh Singarimbun (2008:5) menyebutkan bahwa “Penelitian penjelasan atau *Explanatory* atau *confirmatory research* merupakan penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya”. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan secara kuantitatif dapat mendeskripsikan atau menjelaskan

peristiwa yang menjadi fenomena dalam bentuk angka. Mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian seperti yang ada dalam topik penelitian ini. Sedangkan alasan mengenai jenis penelitian *explanatory research* yang bertujuan mencari hubungan antara variabel bebas dan terikat dan hal tersebut sesuai dengan inti dari jenis penelitian kuantitatif yaitu mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian yang harus didefinisikan dalam bentuk definisi operasional. Penelitian ini menjelaskan pengaruh tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

III.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang terletak di jalan S.Parman Nomor 100 Blimbing Kota Malang.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Kanwil DJP III Jawa Timur wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Wilayah ini merupakan wilayah yang mulai berkembang cukup pesat dari segi perkebunan, pertanian, pariwisata, pendidikan, serta industri yang menyebabkan cukup banyak penduduk, baik pendatang maupun penduduk asli yang melakukan kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan penerimaan PPN. Serta merupakan salah satu Kanwil di Indonesia yang naik pencapaiannya dibanding tahun sebelumnya, selain itu banyak capaian prestasi yang diterima tiap tahun.

III.3 Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran

III.3.1 Variabel

Menurut Sugiyono (2015:61) menjelaskan bahwa “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian untuk ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini telah menentukan variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut :

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2015:61) menjelaskan bahwa “Variabel bebas (*Independent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu sebagai berikut:

- 1) Tingkat inflasi (X1)
- 2) Tingkat pertumbuhan ekonomi (X2)

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2015:61) mengemukakan bahwa “Variabel terikat (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

III.3.2 Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Bebas (*Independent*)

1) Inflasi (X1)

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-penerus dari satu periode ke periode lain. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga pada tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Dalam penelitian kali ini, data inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi di Malang per bulan sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2018. Data ini didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk persen (%).

2) Tingkat pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur dari pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran dengan harga konstan, dimana PDRB merupakan total nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan ditambah dengan pajak dikurangi subsidi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di Malang per bulan sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Data ini didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan persen (%).

b. Variabel terikat (*Dependent*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai per bulan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dapat diambil datanya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan satuan rupiah.

III.3.3 Skala Pengukuran

Skala pengukuran variabel bebas berupa tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio yaitu dalam bentuk persen. Menurut Suryahadi (2009) menjelaskan bahwa “Skala rasio adalah skala yang dapat dibedakan, diurutkan dan mempunyai jarak dapat dibandingkan”. Sedangkan untuk variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk satuan. Indikator dari setiap variabel yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran

Variabel	Indikator	Pengukuran	Sumber
X ₁	Tingkat inflasi	Indeks harga konsumen $\text{Laju inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100\%$	(Putong, 2013)
X ₂	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Produk nasional bruto $g = \frac{PN\ riil_1 - PN\ riil_0}{PN\ riil_0} \times 100$	(Sukirno, 2011)
Y	Penerimaan PPN	Tariff pajak dan dasar pengenaan pajak PPN = Tarif x DPP	Pasal 1 (15) dan Pasal 8A UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM

Skala pengukuran inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan rasio berbeda dengan variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka dari itu perlu dilakukan transformasi data. Menurut Ghazali (2013:36)

Transformasi data merupakan proses mengkonversikan data kedalam format lain

yang sesuai dengan kebutuhan analisa. Pada tahapan ini akan dilakukan tranformasi data kedalam bentuk, format atau struktur data yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sisi analisa dan visualisasi atas hasil analisa. Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar berdistribusi normal. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk grafik histogram dari data tersebut agar dapat menentukan bentuk transformasi datanya. Dalam penelitian ini, berdasarkan bentuk grafik histogram dari data, dilakukan transformasi data dengan LG10 atau logaritma 10 atau LN.

III.4 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Arikunto (2010:173) adalah keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan pada pernyataan diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang terbatas hanya dari KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Madya Malang.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2015:81-82) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *nonprobability* berupa sampel jenuh.

Sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini berupa data *time series* dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah sampelnya adalah 60 pengamatan. Data

yang digunakan data tahun 2014-2018 karena mengacu pada pengumpulan data yang dilakukan diawal tahun 2020 sehingga data penerimaan PPN untuk tahun 2019 masih berupa data sementara dan belum diproses menjadi data yang valid.

III.5 Metode Pengumpulan data

Data yang akan digunakan dalam analisis dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Indriantoro (2002: 147) menjelaskan bahwa “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan dokumentasi yang dimiliki oleh lokasi penelitian yang telah ditentukan. Perolehan data tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi diperoleh dari website BPS Kota Malang yaitu, www.malangkota.bps.go.id dan penerimaan PPN Kota Malang didapat dengan melakukan permohonan secara dalam jaringan (daring) melalui www.eriset.pajak.go.id untuk selanjutnya diteruskan via *e-mail* humaskanwilmalang@gmail.com. Metode ini dilakukan karena adanya pengehentian pelayanan pajak secara tatap muka sebagai imbas dari wabah covid-19.

III.6 Teknik Analisis Data

III.6.1 Uji Asumsi Klasik

III.6.1.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) menyebutkan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan melalui dua yaitu dengan melihat grafik histogram dan dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal grafik *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusannya untuk grafik histogram yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi mengikuti asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

III.6.1.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi masalah

multikolonieritas adalah dengan melihat faktor *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF \leq 10$ dan $TOL \geq 0,1$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas. Deteksi ini melalui program SPSS dengan analisis *Collinearity Statistics*.

III.6.1.3 Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam model regresi berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dapat dipastikan mengalami masalah autokorelasi. Model regresi yang diharapkan adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mengecek autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (D-W). Dimana jika angka D-W dibawah -2 ada Autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada Autokorelasi, dan angka D-W diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif. Penelitian dengan data yang baik adalah data penelitian yang tidak mengandung korelasi maupun korelasi negatif.

III.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi keseimbangan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sebaliknya jika ada perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,

2013:139). Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah menggunakan uji *Glejser*. Menurut Ghozali (2013:142) uji *Glejser* dapat diuji dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai Signifikansi variabel independent $< 0,05$: terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai Signifikansi variabel independent $> 0,05$: tidak terjadi heteroskedastisitas.

III.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio, dimana analisis regresi digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen apabila variabel independen dinaikkan atau diturunkan (Sugiyono, 2011:153). Menurut Ghozali (2013) penggunaan regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sekaligus untuk mengetahui besaran dan arah tanda variabel-variabel bebas.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu tingkat inflasi (X_1) dan tingkat pertumbuhan ekonomi (X_2) terhadap variable terikatnya yaitu penerimaan PPN (Y). Analisis regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS dengan persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = variable dependen (penerimaan PPN)

α = konstanta

β = koefisien

X_1 = variable independen (tingkat inflasi)

X_2 = variable independen (tingkat pertumbuhan ekonomi)

e = variable pengganggu (*error*)

III.6.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan adanya keterkaitan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pengujian hipotesis dilakukan sebagai upaya dalam menguji korelasi dari variabel yang akan diteliti, dalam hal ini keterkaitan antara korelasi pengaruh tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengujian hipotesis yaitu:

III.6.3.1 Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)

Menurut Ghozali (2013:63), Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Dengan melihat F_{hitung} terhadap F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 0,05 dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Dengan melihat F_{hitung} terhadap F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada α 0,05 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

III.6.3.2 Uji Signifikan Parsial (uji statistik t)

Menurut Ghozali (2013:63), Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu :

- a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

III.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikatnya. Koefisien ini menunjukkan besaran persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model yang mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan 0 (nol) artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 0 (nol) artinya lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 1 artinya kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2013:87).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

IV.1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Malang ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jatim III memiliki wilayah kerja sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten dan 6 (enam) Kotamadya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha).

Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada posisi yang strategis, diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa.

Di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III terdapat berbagai macam moda transportasi yang mendukung mobilisasi penumpang dan distribusi barang.

Disamping jalur kereta api yang melintang dari ujung barat ke ujung timur, wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III juga memiliki Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Jember, serta Bandara Blimbingsari di Banyuwangi. Selain itu, terdapat pula pelabuhan-pelabuhan berskala kecil seperti Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan Kalbut di Situbondo dan Pelabuhan

Paiton di Probolinggo. Beberapa pelabuhan besar yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya, Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura.

Wilayah ini juga terkenal sebagai kawasan pendidikan. Sebagian perguruan tinggi terkemuka di Jawa timur ada di wilayah ini, antara lain Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Negeri Malang (UNM), Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Jember, Universitas Ma Chung dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain itu terdapat pula beberapa Sekolah Internasional seperti Wesley International School, Bina Bangsa School dan Charis National Academy.

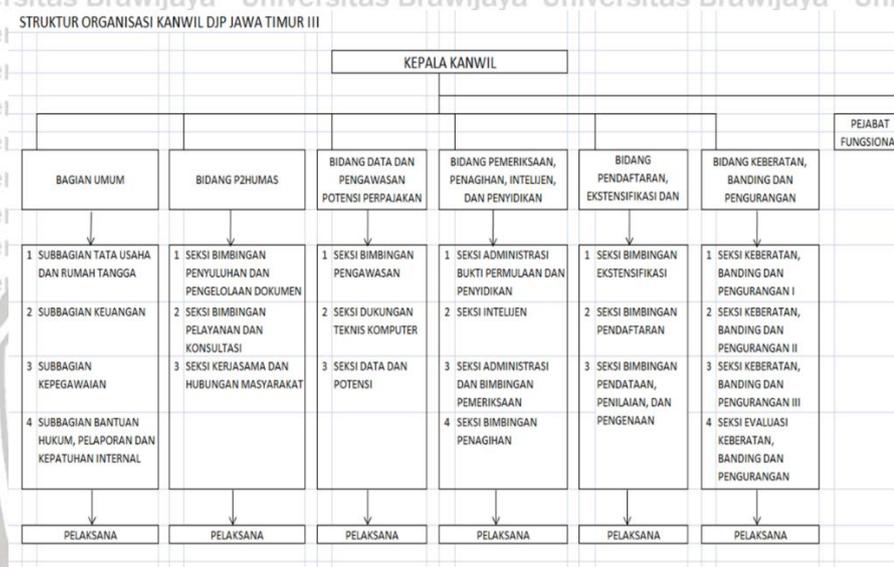
Menurut data perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB), sektor industri menempati ranking teratas sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Timur, disusul sektor perdagangan di ranking kedua dan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di tempat ketiga. Sebagian besar industri berada di wilayah Malang, Kediri dan Pasuruan.

Secara geografis, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III didominasi oleh dataran yang subur. Hal ini tak lepas dari pengaruh deretan gunung yang membujur dari tengah ke timur. Beberapa gunung yang potensial sebagai kawasan wisata antara lain Gunung Ijen di Banyuwangi, Gunung Semeru di Lumajang dan Gunung Bromo di Probolinggo. Selain itu, dengan garis pantai yang hampir mengelilingi semua kota dan kabupaten-nya, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III juga terkenal

dengan pesona pantainya. Sebut saja Pantai Pasir Putih di bagian utara, Pantai Pulau Merah di ujung timur, dan deretan pantai selatan seperti Pantai Popoh, Prigi, Balekambang, Ngliyep dan Papuma.

IV.1.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kanwil DJP Jatim III



IV.1.3 Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Berikut ini daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III beserta kode KPP dan wilayah kerjanya:

1. KPP Pratama Malang Utara (652), wilayah kerja sebagian Kota Malang,
2. KPP Pratama Malang Selatan (623), wilayah kerja sebagian Kota Malang,
3. KPP Pratama Singosari (657), wilayah kerja sebagian Kabupaten Malang,
4. KPP Pratama Kepanjen (654), wilayah kerja sebagian Kabupaten Malang,
5. KPP Pratama Batu (628), wilayah kerja Kota Batu,
6. KPP Pratama Pasuruan (624), wilayah kerja Kota dan Kabupaten Pasuruan,

7. KPP Pratama Probolinggo (625), wilayah kerja Kota, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang,
8. KPP Pratama Jember (626), wilayah kerja Kabupaten Jember,
9. KPP Pratama Blitar (653), wilayah kerja Kota dan Kabupaten Blitar,
10. KPP Pratama Kediri (622), wilayah kerja Kota Kediri,
11. KPP Pratama Pare (655), wilayah kerja Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk,
12. KPP Pratama Tulungagung (629), wilayah kerja Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek,
13. KPP Pratama Situbondo (656), wilayah kerja Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso,
14. KPP Pratama Banyuwangi (627), wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi, dan
15. KPP Madya Malang (651), dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kanwil DJP Jatim III, khusus untuk Wajib Pajak Badan tertentu.

IV.2 Analisis dan Pembahasan

IV.2.1 Statistik Deskriptif

Hasil dari statistik deskriptif variabel yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Penerimaan PPN	60	195201902592.000	3717383152769.000	919770637185.333	678015630657.068
Inflasi	60	-0.570	2.720	0.340	0.493

PDRB	60	5.490	6.030	5.705	0.122
------	----	-------	-------	-------	-------

Berdasarkan Tabel 4.1 didapatkan hasil statistik deskriptif sebagai berikut :

- a. Variabel Penerimaan PPN memiliki nilai terendah sebesar 195201902592 dan nilai tertinggi sebesar 3717383152769. Variabel Penerimaan PPN memiliki rata – rata sebesar 919770637185,333 dengan standar deviasi sebesar 6788015630657,068.
- b. Variabel Inflasi memiliki nilai terendah sebesar -0,570 dan nilai tertinggi sebesar 2,720. Variabel Inflasi memiliki rata – rata sebesar 0,340 dengan standar deviasi sebesar 0,493.
- c. Variabel PDRB memiliki nilai terendah sebesar 5,490 dan nilai tertinggi sebesar 6,030. Variabel PDRB memiliki rata – rata sebesar 5,705 dengan standar deviasi sebesar 0,122.

IV.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi.

Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

IV.2.2.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai sig. (*p-value*) > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46681902
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.066
	Negative	-.107
	Kolmogorov-Smirnov Z	.827
Asymp. Sig. (2-tailed)		.501

a. Test distribution is Normal.

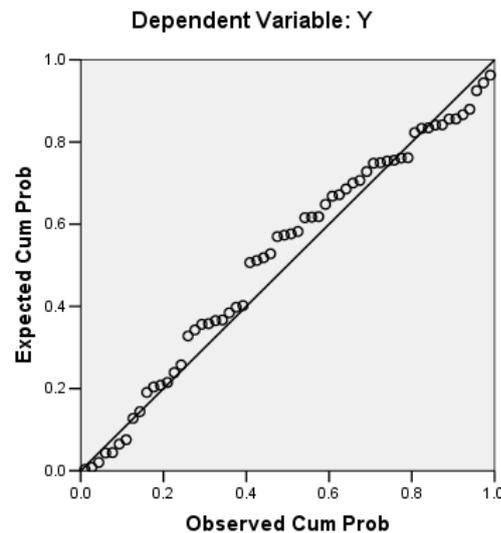
b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.501 (dapat dilihat pada Tabel 4.2) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Gambar 4. 2 P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan uji P-P Plot didapatkan bahwa titik – titik data sudah menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara distribusi normal.

IV.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.856	1.168
X2	0.856	1.168

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.3, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel

bebas:

- Tolerance untuk Inflasi adalah 0.856
- Tolerance untuk PDRB adalah 0.856

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji multikolinieritas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- VIF untuk Inflasi adalah 1,168
- VIF untuk PDRB adalah 1,168

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinieritas dapat terpenuhi.

IV.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ϵ_i). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain.

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (*DW-test*).

Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

$$H_0 : \rho = 0 \text{ (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

$$H_1 : \rho \neq 0 \text{ (terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d , yaitu:

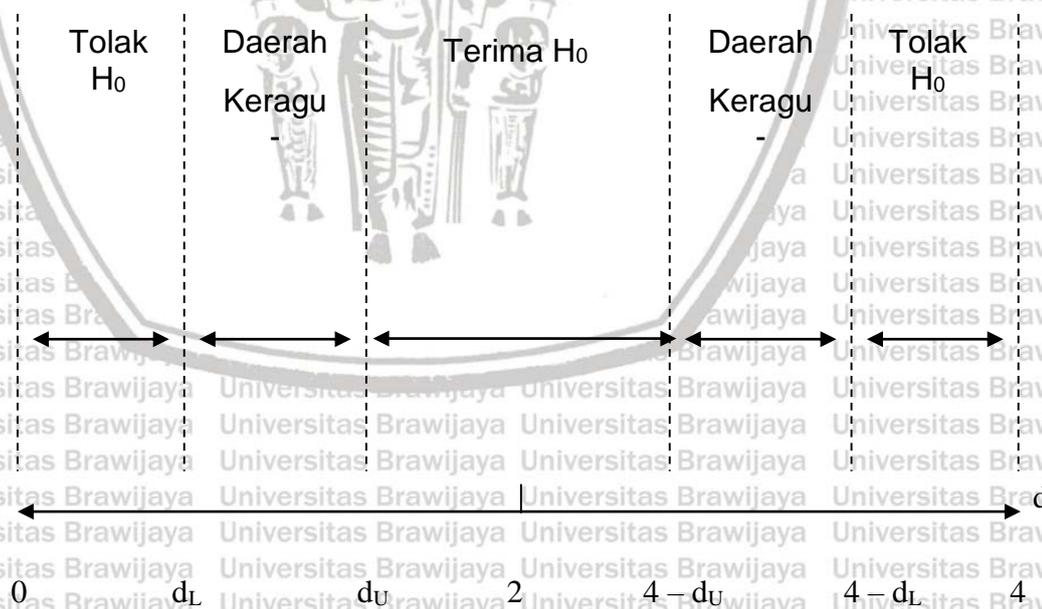
$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n - 1$ karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan.

Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan e_i .
2. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d .

3. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U .
4. Terapkan kaidah keputusan:
 - a. Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
 - b. Jika $d_U < d < (4 - d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.
 - c. Namun jika $d_L < d < d_U$ atau $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



Keterangan:

d_U = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

d_L = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 60$ dan $k = 2$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_U sebesar 1.652 dan $4-d_U$ sebesar 2.348. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.682

Sumber: Data primer diolah

Dari Tabel 4.4 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,682 yang terletak antara 1.652 dan 2.348, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

IV.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji Glejser. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.429	1.792		.797	.429
	X1	.142	.077	.252	1.841	.071
	X2	-.194	.312	-.085	-.621	.537

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber: Data primer diolah

Dengan melihat Tabel 4.5 Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa nilai sig. seluruh variabel adalah $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

IV.2.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Inflasi (X1) dan PDRB (X2) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan PPN (Y).

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows ver 21.00* didapat model regresi seperti pada Tabel 4.6 :

Tabel 4. 6 Persamaan Hasil Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.663	3.141		3.713	0.000
X1	-0.561	0.136	-0.399	-4.136	0.000
X2	2.778	0.547	0.489	5.074	0.000

Berdasarkan pada Tabel 4.6 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 11,663 - 0,561 X_1 + 2,778 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 11,663, menunjukkan bahwa rata – rata Penerimaan PPN jika tidak ada variabel bebas bernilai 11,663
- $b_1 = -0,561$, artinya Penerimaan PPN akan menurun sebesar 0,561% untuk setiap tambahan 1% X_1 (Inflasi). Jadi apabila Inflasi mengalami peningkatan 1%, maka Penerimaan PPN akan Menurun sebesar 0,561% dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- $b_2 = 2,778$, Penerimaan PPN akan meningkat sebesar 2,778 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (PDRB), Jadi apabila PDRB mengalami

peningkatan 1%, maka Penerimaan PPN akan meningkat sebesar 2,778 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

IV.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

IV.2.4.1 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

H_0 diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$

Tabel 4. 7 Uji F/Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	15.479	2	7.739	34.311	0.000
Residual	12.857	57	0.226		
Total	28.336	59			

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai F hitung sebesar 34,311. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 2 : db residual = 57) adalah sebesar 3,159. Karena F hitung >

F tabel yaitu $34,311 > 3,159$ atau nilai sig $F(0,000) < \alpha = 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Penerimaan PPN) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Inflasi (X_1), PDRB (X_2)).

IV.2.4.2 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung $>$ t tabel atau -t hitung $<$ -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika t hitung $<$ t tabel atau -t hitung $>$ -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Hasil Uji t / Parsial

Variabel Terikat	Varaiabel bebas	t hitung	t Tabel	Sig.	Keterangan
Penerimaan PPN (Y)	X1	-4.136	2.002	0.000	Signifikan
	X2	5.074	2.002	0.000	Signifikan

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil sebagai berikut :

- t test antara X_1 (Inflasi) dengan Y (Penerimaan PPN) menunjukkan t hitung = -4,136. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0,05$; db residual = 57) adalah sebesar 2,002. Karena t hitung $<$ t tabel yaitu $-4,136 < -2,002$ atau nilai sig t (0,000) $<$ $\alpha = 0,05$ maka pengaruh X_1 (Inflasi) terhadap Penerimaan PPN adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa Penerimaan PPN dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Inflasi atau dengan meningkatkan Inflasi maka Penerimaan PPN akan mengalami peningkatan secara nyata.

- t test antara X_2 (PDRB) dengan Y (Penerimaan PPN) menunjukkan t hitung = 5,074. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 57) adalah sebesar 2,002.

Karena t hitung > t tabel yaitu $5,704 > 2,002$ atau nilai sig t $(0,000) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (PDRB) terhadap Penerimaan PPN adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan PPN dapat dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB atau dengan meningkatkan PDRB maka Penerimaan PPN akan mengalami peningkatan secara nyata.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN secara simultan dan parsial.

Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Penerimaan PPN adalah PDRB karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

IV.2.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Inflasi (X_1) dan PDRB (X_2)) terhadap variabel terikat (Penerimaan PPN) digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4. 9 Koefisien Korelasi dan Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.739	0.546	0.530

Sumber : Data primer diolah

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.9 diperoleh hasil adjusted R² (koefisien determinasi) sebesar 0,530. Artinya bahwa 53% variabel Penerimaan PPN akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Inflasi(X₁) dan PDRB (X₂). Sedangkan sisanya 47% variabel Penerimaan PPN akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Inflasi dan PDRB dengan variabel Penerimaan PPN, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.739, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Inflasi (X₁) dan PDRB (X₂) dengan Penerimaan PPN termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6-0,8.

IV.2.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini mengambil sebanyak 60 sampel berupa data bulanan selama lima tahun untuk dijadikan pengamatan. Uji asumsi klasik yang menjadi pengujian berikutnya, uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Dimulai dari uji normalitas, dapat dilihat pada tabel Hasil Uji

Normalitas yang dimana pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnof*, dengan nilai signifikan yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya *unstandardrized* terdistribusi normal. Kemudian uji kedua yaitu uji Multikolinearitas dengan nilai *tolerance* masing – masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variable bebas. Uji ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dengan hasil yang menggunakan uji *glejser* didapat bahwa nilai sig. seluruh variabel adalah $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

IV.2.5.1 Pengaruh Inflasi (X_1) terhadap Penerimaan PPN (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial didapatkan nilai t_{hitung} $-4,136 > t_{tabel} 2,002$ atau Signifikansi $t 0,000 < 0,05$, maka H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh positif yang signifikan inflasi terhadap penerimaan PPN ditolak dan H_a yang berbunyi ada pengaruh positif yang signifikan Inflasi terhadap penerimaan PPN diterima. B (nilai koefisien regresi parsial) variabel inflasi bernilai $-0,561$ berarti jika inflasi naik, maka penerimaan PPN akan turun sebesar $-0,561$. Dengan demikian kesimpulannya adalah ada pengaruh negatif yang signifikan variable inflasi terhadap Penerimaan PPN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan pada penerimaan PPN. Konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang karena inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap karena pada umumnya kenaikan upah tidak akan secepat kenaikan harga-harga

sehingga orang akan lebih cenderung melakukan *saving* pada saat terjadi inflasi karena nilai riil dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku (Sukirno, 2012).

Tingginya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. Terjadinya inflasi kemungkinan akan terjadi kuantitas barang yang dibeli berkurang karena harga barang meningkat. Konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi maka penerimaan PPN pun tidak maksimal. Hal ini tentu berakibat pada penerimaan pajak. Syahputra (2006:10) mengungkapkan bahwa “Terlalu tingginya tingkat inflasi bisa berdampak negatif terhadap penerimaan pajak melalui perubahan kondisi ekonomi.” Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Damayanti (2016) secara parsial inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan Margareth (2018) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian Sri Ayu (2017) bahwa variable inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan Laily (2018) yang menyatakan variable inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

IV.2.5.2 Pengaruh PDRB (X₂) terhadap Penerimaan PPN (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial didapatkan nilai t_{hitung} $5,704 > t_{tabel} 2,002$ atau Signifikansi $t 0,000 < 0,05$, maka H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh positif yang signifikan PDRB terhadap Penerimaan PPN ditolak dan H_a yang berbunyi ada pengaruh positif yang signifikan PDRB terhadap Penerimaan PPN diterima. B (nilai koefisien regresi parsial) variabel PDRB bernilai 2,778 berarti jika PDRB karyawan semakin baik, maka Penerimaan PPN akan naik

sebesar 2,778. Dengan demikian kesimpulannya adalah ada pengaruh positif yang signifikan PDRB terhadap Penerimaan PPN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Hubungan yang positif ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Myles (2000) pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman (1961), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat dan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak. Menurut Heady (2000) seperti yang dikutip Gunawan (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penerimaan pajak. Izedonmi dan Okunbor (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Damayanti (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia.

IV.2.5.3 Pengaruh Inflasi (X_1), PDRB (X_2) Secara Simultan terhadap Penerimaan PPN (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi secara simultan didapatkan nilai F_{hitung} 34,311 dengan Signifikansi F $0,000 < 0,05$, maka H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh positif yang signifikan Inflasi dan PDRB secara simultan terhadap Penerimaan PPN ditolak dan H_a yang berbunyi ada pengaruh positif yang signifikan Inflasi dan PDRB secara simultan terhadap Penerimaan PPN diterima.

Jika dilihat dari nilai *Adjust R Square* yang diperoleh, maka Inflasi dan PDRB

memiliki pengaruh sebanyak 53% dalam mempengaruhi Penerimaan PPN, sedangkan sisanya 47% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan Firmanzah (2015) bahwa inflasi yang terlalu rendah, bahkan berada di level deflasi, akan menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu tinggi juga akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan agar target-target pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, bertambahnya output nasional, penerimaan pajak, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Tercapainya pertumbuhan ekonomi dan stabilnya tingkat inflasi tentu akan meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti (2016) yang menyatakan bahwa variabel ekonomi makro (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial Inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Menyatakan bahwa hipotesis H1 yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.
2. Berdasarkan hasil uji parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Membuktikan bahwa hipotesis H2 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.
3. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Membuktikan bahwa hipotesis H3 yang menyatakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi, perusahaan, maupun pihak-pihak lain.

Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Diharapkan pihak pemerintah dapat mengendalikan laju inflasi, karena jika inflasi meningkat dapat berpengaruh pada menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Karena masyarakat cenderung menyimpan uangnya sehingga penerimaan PPN menjadi kurang optimal. Kemudian untuk variabel PDRB pemerintah diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat dengan cara membuka investasi, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengingat variable PDRB mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi Penerimaan PPN
2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Penerimaan PPN diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Case dan Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Indeks
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program ed. 7*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nanga, M. 2005. *Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta Rajawali Gravindo
- Putong, I. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Ed. 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahardja, P. 2004. *Teori Ekonomi Makro*. Ed. 2. Jakarta: Universitas Indonesia
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Singarimbun, Masri. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukardji, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Grafindo Persada

Sukirno, S. 2004. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. 2011. *Pengantar Makro Ekonomi Teori*. Ed.3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia, Buku 2 Edisi Kedelapan*. Jakarta: Salemba Empat

B. Jurnal

Aizenman, Joshua, Yothun Jinjarak. 2005. The Collection Efficiency Of The Value Added Tax: Theory And International Evidence. *National Bureau Working Paper IJEL*, 15(21):pp:571-610.

Ajakaiye, D.O. 2000. Macroeconomic Effects Of VAT In Nigeria: A Computable General Equilibrium Analysis. *AERC Research Paper* 92, 15(3):pp:344-371.

Damayanti, O. 2016. Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-Negara Asia. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9 No. 1 2016

Greytak, David and Bernard Jump, 1977. Inflation and Local Government Expenditures and Revenues: Method and Case Studies. *Journal Public Finance*, 5(3):pp:275-302

Kusmono, Heru. 2011. Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal USU*, 13(2). 2016

Kuznets, Simon. 2009. Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Journal*, 14(2):pp:335-357

Peacock, Alan T. & Wiseman, Jack. 1961. The Growth Of Public Expenditure Volatility In Indonesia. *Journal Post-Reformation Era*, 9(2):pp:209-225.

Renata, Almira H. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Jawa Timur. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1) 2016.

Richard dan Agus Arianto Toly, 2013. Analisa Korelasi Inflasi, Economic Growth, Economic Structure, Dan Tax Rate Terhadap Tax Revenue Di Negara-Negara ASEAN. *Tax dan Accounting Review*, Vol. 3, No. 2 : 1– 12.

Wahyudi, E. 2009. Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak. Bogor: *Institut Pertanian Bogor Jurnal Ekonomi*, Vol. 6 No. 1

Wibowo, Danny, 2013. Pengaruh Pendapatan perkapita, Economic Growth Rate, Economic Structure dan Tax Rate terhadap Tax Ratio pada Negara-Negara OECD dan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 11 no.1 : 45 – 61

Zeng, Kanghua; Li, Shan, dan Li, Qian. 2013. The Impacts of Economic Growth and Tax Reform on Tax Revenue and Structure: Evidence from China Experiences. *Modern Economy Journal*, 2013, 4, 839-851

C. Internet

Inflasi Bulanan di Kota Malang 2005-2020. Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Diakses pada tanggal 5 Mei 2020 dari

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/3/90/3/inflasi-bulanan-di-kota-malang.html>

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia, 2010-

2019. Badan Pusat Statistik Kota Malang. Diakses pada tanggal 5 Mei

2020 dari [https://malangkota.bps.go.id/indicator/52/434/1/laju-](https://malangkota.bps.go.id/indicator/52/434/1/laju-pertumbuhan-ekonomi-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia.html)

[pertumbuhan-ekonomi-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia.html](https://malangkota.bps.go.id/indicator/52/434/1/laju-pertumbuhan-ekonomi-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia.html)

Penerimaan PPN Kanwil DJP Jawa Timur III 2014-2018. E-riset DJP. Diakses pada

tanggal 10 September 2020 dari <https://eriset.pajak.go.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset Kanwil DJP Jawa Timur III



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 553737, 568914, 558226 Fax. +62341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id <http://fia.ub.ac.id>

Nomor : 3885 /UN10.F03.12/PN/2020

Lampiran :

Lampiran Hal: Riset Penelitian

Kepada : Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
Jl. Letjend S. Parman No.100, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
(0341) 403333

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Hamam Subagyo

Alamat : RT 2 RW 1 Bendosewu Talun Blitar Jawa Timur

NIM : 155030400111016

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Administrasi Bisnis

Tema : Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tujuan : Jl. Letjend S. Parman No.100, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 (0341) 403333

Lamanya : 1 (satu) bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 03 Juni 2020

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Bisnis



Prof. Dr. Mochammad AlMusadico, MBA
NIP. 19580501 198403 1 001



Lampiran 3. Data Diri**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****BIODATA**

Nama : Hamam Subagyo

Nomor Induk Mahasiswa : 155030400111016

Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 03 April 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Email : svbagyo@gmail.com

Alamat : RT 02 RW 01 Bendosewu Talun Blitar Jawa Timur

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

- | | |
|---|-----------|
| 1) TK Pertiwi Mayangsari | 2001-2003 |
| 2) SD Negeri Bendosewu 02 | 2003-2009 |
| 3) SMP Negeri 01 Kesamben | 2009-2012 |
| 4) SMA Negeri 01 Talun | 2012-2015 |
| 5) Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang | 2015-2021 |

PENGALAMAN MAGANG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota Administrasi Music Club (AMC) 2015

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

PENGALAMAN KEPANITIAAN

- | | |
|---|------|
| 1) Staff Translog Diklat AMC | 2016 |
| 2) Staff Perlengkapan Tax Hearing | 2016 |
| 3) Staff Tanslog EUPOFIA DN FIA UB 56 | 2016 |
| 4) Staff Perlengkapan SEMNAS Perpajakan | 2017 |